

## **BPK Izinkan Bayar SPMLS Terlambat**

KENDAL - Para kontraktor yang dananya sempat tertahan karena tidak bisa dicairkan akibat keterlambatan pengajuan surat permohonan membayar langsung (SPMLS) akhirnya dapat bernafas lega. Pasalnya hasil konsultasi Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sinyal dana tersebut dapat dicirikan dengan sejumlah persyaratan.

Kabid Anggaran DPPKAD, Mardi Edi Susilo SEPar Mpar mengatakan, sesuai dengan hasil konsultasi yang dilakukan dengan BPK dan kemendagri dana kegiatan yang sebelumnya tak bisa dicairkan karena keterlambatan pengajuan SPMLS bisa dicairkan dengan sejumlah syarat.

Diejlaskan, berdasarkan Permendagri No 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 dana tersebut bisa dicairkan. "Dana tersebut bisa dicairkan setelah kita melakukan perubahan peraturan bupati yang merujuk pada Permendagri No 27 Tahun 2013," jelasnya. Dikatakan setelah melakukan perubahan peraturan bupati lantas diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Menurut Mardi, sesuai kon-

sultasi dengan kemendagri, ada ketentuan dana yang boleh dibayar dengan mekanisme itu hanya untuk pekerjaan yang benar-benar selesai 100 persen dan fisik sempurna. "Jika kegiatan tak selesai 100 persen sesuai progres pembayaran tak menggunakan mekanisme ini, tapi di APBD Perubahan," jelasnya.

Mardi mengaku, dari SMPLS yang masuk di DPPKAD setelah dikoreksi ternyata banyak yang kurang persyaratannya dan asal kirim sehingga DPPKAD mengembalikan SPMLS untuk diperbaiki. Ditambahkan, tahun 2012 ada kegiatan senilai Rp 7,2 miliar tak bisa dibayarkan karena administrasinya tidak lengkap.

### ■ Kekurangan Tenaga

Bupati Kendal, dr Hj Widya Kandi Susanti MM saat dikonfirmasi mengatakan, kasus tersebut merupakan dampak dari kekurangan tenaga di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dicontohkan sesuai dengan analisis beban kerja di Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana (BPPKB) masih kekurangan 58 orang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 18 orang.

Menurut bupati, Pemkab



Foto: Agus Umar

### Widya Kandi Susanti

Kendal yang terdiri dari sekitar 60 SKPD kekurangan sekitar 1.500 PNS. Selain kekurangan tenaga persiapan administrasi, seperti lelang, jika pesertanya kurang harus dilelang ulang.

"Keterlambatan lelang juga disebabkan dampak dari kasus-kasus lama yang mengharuskan sejumlah pegawai diperiksa sehingga menimbulkan trauma. Yang pasti kita akan usahakan agar dana tersebut tetap cair namun tak menyalahi aturan," ujarnya. ■ Mar/SR